



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III SULAWESI BARAT**

2024

**LAPORAN
KEUANGAN
(AUDITED)**

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III SULAWESI BARAT**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinya.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan *akuntabel*.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mamuju, 8 Mei 2025

**Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas III Sulawesi Barat**



Ahmad Rezy Setiawan, A.TD.,M.Si
NIK. 19700730 199301 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan Keuangan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	21
C. Penjelasan atas Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos Laporan Operasional.....	36
E. Penjelasan atas Pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
VI. Lampiran Dari Aplikasi Sakti	



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III SULAWESI BARAT

Jl. Musa Karim, Karema, Kec. Mamuju,
Kab. Mamuju, Sulawesi Barat 91512

Telp/Fax. |
0426 -

Email : bptdkelas3sulbar@gmail.com

Home page : <https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/sulbar>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat selaku UAKPB yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mamuju, 8 Mei 2025

**Kepala Balai Pengelola
Transportasi Darat
Kelas III Sulawesi Barat**



Ahmad Rezy Setiawan, A.TD.,M.Si

NIP. 19700730 199301 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat 31 Desember Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja sampai 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar **Rp 11.536.800,00** Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp 34.400.732.027,00** atau mencapai **90.69** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp 37.933.113.000,00**. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran pada posisi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):

*Perbandingan Rincian Laporan Realisasi Anggaran
sampai dengan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2023		31 Desember 2024	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PNBP	7.000.000	200.000	7.000.000	11.536.800
Belanja	1.439.715.000	1.439.406.225	37.933.113.000	34.400.723.027

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar **Rp 122.496.006.083,00** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp 2.504.201.262,00**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp 114.305.518.914,00**; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp **5.686.285.907,00**. Nilai Ekuitas sebesar **Rp 120.313.487.487,00**.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):

*Perbandingan Rincian Neraca
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	2.504201.262	1.472.137.262	1.032.064.000	70.11
Aset Tetap	114.305.518.914	35.381.973.424	78.923.545.490	223.06
Aset Lainnya	5.686.285.907	1.026.975.510	4.659.310.397	453.69
Jumlah Aset	122.496.006.083	37.881.086.196	84.614.919.887	223.37
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	2.182.518.596	0	2,182,518,596	100
Ekuitas				
Ekuitas	120.313.487.487	37.881.086.196	82.432.401.291	217.61
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	122.496.006.083	37,881.086.196	84.614.919.887	223.37

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp 11.536.800,00** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp25.522.453.067,00** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp 25.510.916.267,00**. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp10.061.965.652,00** dan sebesar **Rp0,00** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp 15.448.950.615,00**.

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Laporan Operasional
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Kegiatan Operasional				
Pendapatan Operasional	11.536.800	200.000	11.336.800	5.668,4
Beban Operasional	25.522.453.067	5.050.393.972	20.472.059.095	405,3
<i>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</i>	<i>25.510.916.267</i>	<i>5.050.193.972</i>	<i>20.460.722.295)</i>	<i>405,1</i>
Kegiatan Non Operasional				
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10.061.965.652	0	10.061.965.652	100
<i>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Surplus (Defisit) – LO	15.448.950.615	5.050.193.972	10.398.756.643	205,9

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp 37.881.086.196,00** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp15.448.950.615,00** ditambah dengan koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas senilai **Rp 9.058.570.671,00** dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp 15.219.221.302,00** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp 106.939.922.577,00**.

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Perubahan Ekuitas
31 Desember 2024 dan 3 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Ekuitas Awal	37.881.086.196	0	37.881.086.196	100
Surplus (Defisit) – LO	15.448.950.615	5.050.193.972	10.398.756.643	205,9
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	0	0	0	-
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	9.058.570.671	3.475.841.683	5.582.728.988	160,6
Transaksi Antar Entitas	106.939.922.577	46.407.121.851	60.532.800.726	130
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	82.432.401.291	37.881.086.196	44.551.315.095	117,6
Ekuitas Akhir	120.313.487.487	37.881.086.196	82.432.401.291	217,6

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

URAIAN	KATEGORI	31 Desember 2024		% Realisasi	31 Desember 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	7.000.000	11.536.800	165	200.000
JUMLAH PENDAPATAN		7.000.000	11.536.800	165	200.000
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	22.477.261.000	22.301.232.907	99,22	1.375.706.225
Belanja Modal	B.5	15.455.852.000	12.098.888.620	78,28	63.700.000

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NERACA 31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Persediaan	C.2	2.504.201.262	1.472.137.262
Jumlah Aset Lancar		2.504.201.262	1.472.137.262
ASET TETAP			
Tanah	C.3	9.080.752.453	9.080.752.453
Peralatan dan Mesin	C.4	213.132.349.896	174.274.127.491
Gedung dan Bangunan	C.5	37.814.158.139	4.837.474.039
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.6	8.218.979.000	732.215.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.7	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.8	24.041.065.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(177.981.785.574)	(153.542.595.559)
Jumlah Aset Tetap		114.305.518.914	35.381.973.424
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.10	2.493.093.000	-
Dana yang dibatasi penggunaannya	C.11	2.182.518.596	-
Aset Lain-Lain	C.12	4.077.506.784	3.909.186.784
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.13	(3.066.832.473)	(2.882.211.274)
Jumlah Aset Lainnya		5.686.285.907	1.026.975.510
JUMLAH ASET		122.496.006.083	37.881.086.196
KEWAJIBAN			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13	2.182.518.596	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.14	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.15	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.182.518.596	-
JUMLAH KEWAJIBAN		2.182.518.596	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.16	120.313.487.487	-
JUMLAH EKUITAS		120.313.487.487	-

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

LAPORAN OPERASIONAL

31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	234.835.000	53.829.520
Beban Barang dan Jasa	D.4	15.845.186.402	724.715.094
Beban Pemeliharaan	D.5	1.731.148.245	78.815.400
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.990.938.260	537.327.211
Beban Barang Untuk diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	9.601.937.942	3.655.706.747
JUMLAH BEBAN		31.404.045.849	5.050.393.972
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(31.404.045.849)	(5.050.393.972)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9	-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(31.404.045.849)	(5.050.393.972)
POS LUAR BIASA			
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(31.404.045.849)	(5.050.393.972)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	E.1	37.881.086.196	-
Surplus/Defisit - LO	E.2	(31.392.509.049)	5.050.193.972
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	E.3	1.003.394.981	(3.475.841.683)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	E.3.1	-	
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.2	-	
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.3	-	
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.4	-	
Selisih Revaluasi Aset	E.3.5	-	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.6	1.003.394.981	(3.475.841.683)
Koreksi Lain-Lain	E.3.7	-	
Transaksi Antar Entitas	E.4	106.939.922.577	37.881.086.196
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		76.550.808.509	39.455.438.485
EKUITAS AKHIR	E.5	114.431.894.705	39.455.438.485

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

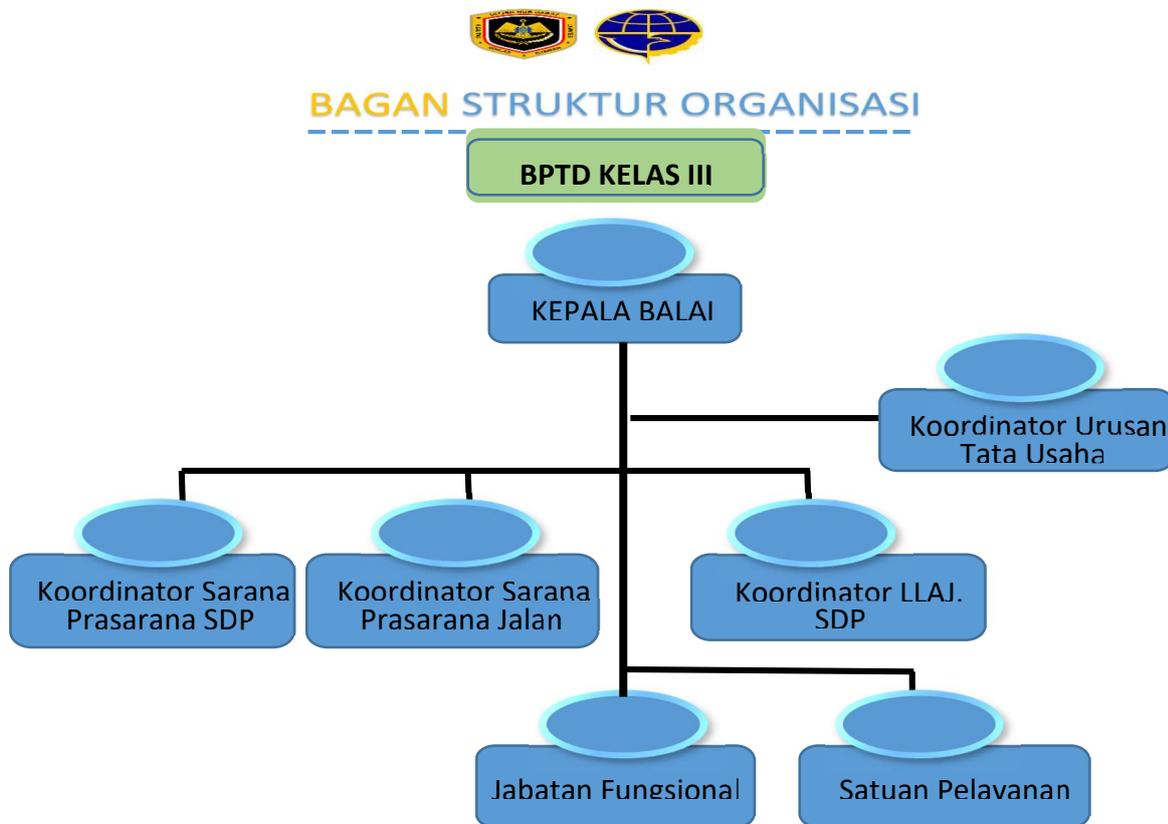
A.1 Profil. Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat merupakan salah satu unit eselon IV yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana. program. dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A. terminal barang untuk umum. unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor. dan pelabuhan sungai. danau. penyeberangan;
- c. pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan. keselamatan dan keamanan pelayaran sungai. danau dan penyeberangan. serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
- d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan. sungai. danau dan penyeberangan;
- e. pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. sungai. danau. dan penyeberangan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha. rumah tangga. sumber daya manusia. keuangan. hukum. dan hubungan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat. dapat digambarkan sebagai berikut:



A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat. Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan data pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan aplikasi MonSAKTI yang digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan. SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep

single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. Laporan Keuangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Tahunan Tahun 2024 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.3 Basis Akuntansi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran

- a) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan – Laporan Operasional

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- b) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
- c) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat

berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- b) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar. Aset Tetap. Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 2) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - o Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang

ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- 6) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - o harga pembelian terakhir. apabila diperoleh dengan pembelian;
 - o harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - o harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b) Aset Tetap

- 1) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - o Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah. jalan/irigasi/jaringan. dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah. Gedung dan Bangunan. serta Jalan. Jaringan. dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar. pendekatan biaya. dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian. pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- 4) Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun. apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku

sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- 5) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c) Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - o Tanah;
 - o Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - o Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan

Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d) Piutang Jangka Panjang

- a) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e) Aset Lainnya

- a) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar. aset tetap. dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud. tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- b) Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- c) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- d) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i> Komputer	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun
Lisensi. Hak Paten Sederhana. Merk. Desain Industri. Rahasia Dagang. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran. Paten Biasa. Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan. Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan. Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- e) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas. disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

f) Kewajiban

- a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan

Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- c) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

g) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENDAPATAN NEGARA

Realisasi Pendapatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp 11.536.800,00**. Realisasi Pendapatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat. Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan serta Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
sampai dengan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)*

Uraian	Realisasi Pendapatan	
	Pendapatan	%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan dan Pemindahtanganan BMN		-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	600.000	-
Pendapatan Lain-Lain		-
Penerimaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	7.000.000	
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.936.800	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-
Jumlah	11.536.800	-

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 mengalami Kenaikan dibandingkan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat merupakan satuan kerja baru terbentuk pada tahun 2023.

B.2 BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat pada 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp 34.400.121.527,00** atau **91 persen** dari anggaran belanja sebesar **Rp 37.933.113.000,00**. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

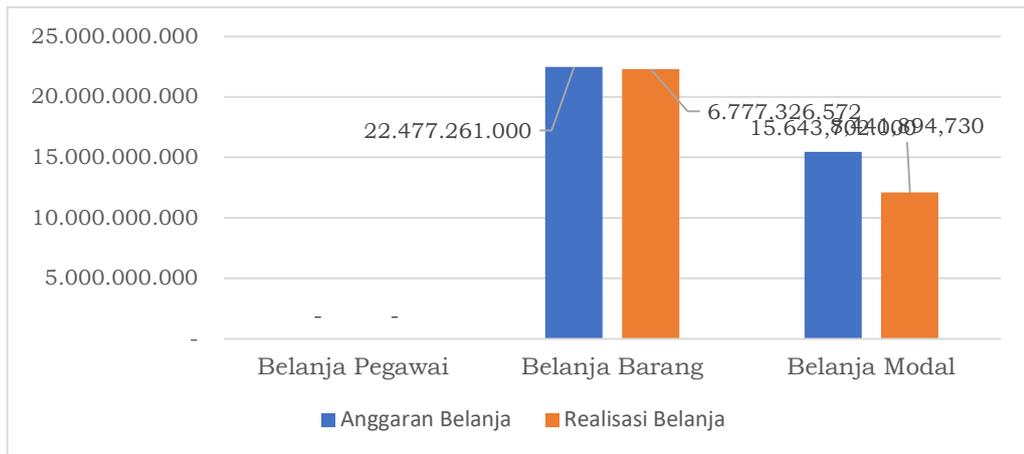
*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)*

Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Realisasi	% Naik (Turun)
-	-	0%	-	-
22.477.261.000	22.301.232.907	99%	1.375.706.225	1.521,08
15.455.852.000	12.098.888.620	78%	63.700.000	18.893,55
37.933.113.000	34.400.121.527	90,69	1.439.406.225	2.289,88

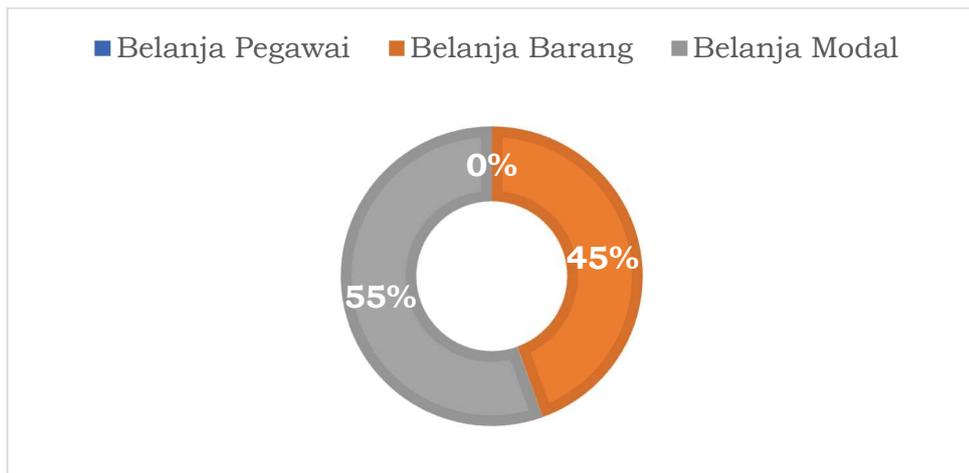
Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar **2.289 persen** dibandingkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023.

Komposisi pagu anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:

*Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja
sampai dengan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)*



*Komposisi Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
sampai dengan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)*



B.3 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp 0,00** Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar **0 persen** dari 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan Oleh penggajian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat masih dilaksanakan Oleh Satuan kerja Lama Yakni Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan.

Rincian Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

*Realisasi Belanja Pegawai
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2024				% Realisasi Anggaran	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Belanja	Pengembalian Belanja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
BELANJA PEGAWAI							
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Uang Makan PNS	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tunj. Umum PNS	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Lembur							
Belanja Uang Lembur	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	-	-	-	-	-	-	0,00
Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito							
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	-	-	-	-	-	-	-

B.4 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 22.301.232.907,00** dan **Rp1.375.706.225,00** Realisasi Belanja Barang 1 Desember 2024 mengalami kenaikan karena Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat Merupakan Satuan kerja Baru **100 persen** dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023. Rincian Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

*Realisasi Belanja Barang
yang berakhir 31 desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2024				% Realisasi Anggaran	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Belanja	Pengembalian Belanja	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
BELANJA BARANG							
Belanja Keperluan Perkantoran	3.455.820.013	3.455.820.013	-	3.455.820.013	100,00	30.674.200	0,89
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	564.852.520	564.852.520	-	564.852.520	100,00	107.524.000	19,04
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	106.880.000	106.880.000	-	106.880.000	100,00	53.848.000	50,38
Belanja Barang Operasional Lainnya	672.581.000	670.643.920	-	670.643.920	99,71	68.009.578	10,14
Belanja Bahan	37.542.000	37.527.000	-	37.527.000	99,96	70.860.774	188,83
Belanja Honor Output Kegiatan	108.730.000	108.380.000	-	108.380.000	99,68	100.000.000	92,27
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9.210.312.000	9.181.930.955	-	9.181.930.955	99,69		-
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakontabel	14.285.000	6.265.000	-	6.265.000	43,86		-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	204.945.000	204.635.000	-	204.635.000	99,85		-
Belanja Langganan Listrik	66.120.000	65.578.746	-	65.578.746	99,18		-
Belanja Air	2.004.000	1.864.200	-	1.864.200	93,02		-
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	358.707.000	351.964.048	-	351.964.048	98,12	125.399.042	35,63
Belanja Sewa	1.323.680.000	1.323.680.000	-	1.323.680.000	100,00		
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	332.472.000	332.400.000	-	332.400.000	99,98		
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	1.195.249.000	1.172.052.245	-	1.172.052.245	98,06		
Belanja Bahan Bakar Minyak	226.729.000	226.696.000	-	226.696.000	99,99		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.465.953.000	3.462.937.824	-	3.462.937.824	99,91		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	89.600.000	89.600.000	-	89.600.000	100,00		
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	476.697.000	438.400.436	-	438.400.436	91,97		
Belanja Belanja Peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat /Pemda	560.881.000	499.125.000	-	499.125.000	88,99		
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	22.474.039.533	22.301.232.907	-	22.301.232.907	99,23	556.315.594	2,49

B.5 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 15.455.852.000,00** dan **Rp53,96** Realisasi

Belanja Modal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dari Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023.

*Realisasi Belanja Modal
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2024		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.455.852.000	12.098.888.620	78,28	63.700.000	18.893,55
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah	15.455.852.000	12.098.888.620	78,28	63.700.000	18.893,55

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing **Rp 12.098.888.620,00** dan **Rp63.700.000,00**. Belanja modal peralatan dan mesin merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian. biaya pengangkutan. biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Belanja Modal
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2024		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.455.852.000	12.098.888.620	78,28	63.700.000	18.894
Jumlah	15.455.852.000	12.098.888.620	78,28	63.700.000	18.894

B.5.2. Belanja Modal lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **0,00** dan **Rp0,00**. Belanja modal lainnya digunakan untuk memperoleh Aset Tetap lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat di kategorikan dalam Belanja Modal Tanah. Gedung dan Bangunan. Peralatan Mesin. dan Jalan. Irigasi dan Jaringan. sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

Rincian Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Belanja Modal Lainnya
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2024		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL LAINNYA					
Belanja Modal lainnya	0	0	0	-	-
Jumlah	0	0	0	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0.00 dan Rp0.00. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp 2.504.201.262,00** dan **Rp 1.472.137.262,00**. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan/atau untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan yang signifikan, terdiri atas barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional (Barang Konsumsi dan Bahan untuk Pemeliharaan).

Rincian Persediaan per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Jumlah	%
Barang Konsumsi	-	-	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-	-
Bahan Baku				
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	2.504.201.262	1.472.137.262	1.032.064.000	70,11
Jumlah	2.504.201.262	1.472.137.262	1.032.064.000	70,11

C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp9.080.752.453,00** dan **Rp Rp9.080.752.453,00**.

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp 213.132.349.896,00** dan **Rp174.274.127.491,00**. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Peralatan dan Mesin
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Kode	Uraian Transaksi	Peralatan dan Mesin
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>
999	Saldo Awal	174.274.127.491
101	Pembelian	552.797.120
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(10.061.965.652)
105	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	11.546.091.500
112	Perolehan Lainnya	10.061.965.652
102	Trasnfer Masuk	26.759.333.785
305	Koreksi Pencatatan	(0)
	Jumlah	213.132.349.896

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp 37.814.158.139,00** dan **Rp 4.837.474.039,00**

C.6 Jalan. Irigasi dan Jaringan

Nilai aset tetap berupa Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp 8.218.979.000,00** dan **Rp732.215.000,00**.

C.7 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah **5.669.984.708,00** dan **Rp1.026.975.510,00**. Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah. peralatan dan mesin. gedung dan bangunan. jalan. irigasi dan jaringan.

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing **Rp(183.847.077.157,00)** dan **Rp(153.542.595.559,00)**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)*

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
2	3	4	5
Tanah	9.080.752.453	-	9.080.752.453
Peralatan dan Mesin	213.132.349.896	178.417.900.449	34.714.449.447
Gedung dan Bangunan	37.814.158.139	3.900.949.216	33.913.208.923
Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.218.979.000	1.511.018.671	6.707.960.329
Aset Tetap Lainnya	24.041.065.000	-	24.041.065.000
Total	292.287.304.488	183.829.868.336	108.457.436.152

C.9 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp2.493.093.000,00** dan **Rp0,00**. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET TAK BERWUJUD				
<i>Software</i>	-	-	-	-
Hasil Kajian/Penelitian	199.768.000	-	199.768.000	-
Aset Tak Berwujud Lainnya	2.293.325.000	-	2.293.325.000	-
Jumlah	2.493.093.000	-	2.493.093.000	-

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 terdapat transaksi mutasi tambah Transfer Masuk dari BPTD Kelas II Sulawesi Selatan sehingga saldo akhir Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 mengalami perubahan dari saldo 31 Desember 2023 .

C.10 Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Nilai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Aset Tak

Berwujud Dalam Pengerjaan adalah ATB yang pengerjaannya melebihi dan/atau melewati 1 (satu) periode tahun anggaran. sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

C.11 Aset Lain-Lain

Nilai Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah **Rp 4,077,506,784,00** dan **Rp3.909.186.784,00**. Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta dalam proses penghapusan dari BMN.

*Rincian Aset Lain-Lain
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET LAIN-LAIN				
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	4.077.506.784	3.909.186.784	168.320.000	4,31
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	-	-	-	-
Jumlah	4.077.506.784	3.909.186.784	168.320.000	4,31

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah per 31 Desember 2024 tidak terdapat transaksi mutasi tambah atau mutasi kurang sehingga saldo akhir Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah per 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan dari saldo 31 Desember 2023.

C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp (3.083.133.672,00)** dan **Rp 2.898.512.473,00**.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4	5
1	Aset Tak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-Lain	3.083.133.672	2.865.910.075	217.223.597
Total		3.083.133.672	2.865.910.075	217.223.597

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.13 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 0,00** dan **Rp0,00**. Rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA				
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	0	-	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	0	-	0
Pengeluaran transitio yang masih harus dibayar	-	0	-	0
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	-	-	-	0

C.14 Utang yang Belum Ditagihkan

Saldo Utang yang belum ditagihkan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 0,00** dan **Rp0,00**. Utang yang Belum ditagihkan diantaranya Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Belanja Perjalanan

Dinas Paket Meeting Luar Kota. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya. dan lain-lain.

C.15 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 0.00 dan Rp0.00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.16 Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 114.431.894.705,00** dan **Rp37.881.086.196,00**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 11.536.800,00** dan **Rp200.000,00**. Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2024 tidak mengalami penurunan atau kenaikan dibandingkan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Perbandingan Rincian Pendapatan PNB
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
Pendapatan PNPB Lainnya			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan BMN			
Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	7.000.000	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.936.800	-	-
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	600.000	200.000	300,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN	11.536.800	200.000	5.668,40

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Belanja tersebut terdiri dari:

*Perbandingan Rincian Beban Pegawai
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	-
Beban Tunj. Beras PNS	-	-	-
Beban Uang Makan PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar **336 persen** dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 234.835.000,00** dan **Rp53.829.520,00**.

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	228.835.000	52.139.520	338,89
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	6.000.000	1.690.000	255,03
Jumlah	234.835.000	53.829.520	336,26

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 15.845.186.402,00** dan **Rp 724.715.094,00**. Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar **2096 persen** dibandingkan dengan 31 Desember 2023.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 1.731.148.245,00** dan **Rp78.815.400,00**.

Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.962.000	15.049.200	132,32
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	121.945.000	5.379.000	2.167,06
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	58.387.200	(100,00)
Jumlah	156.907.000	78.815.400	99,08

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 3.990.938.260,00** dan **Rp537.327.211,00**. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	3.462.937.824	537.327.211	544,47
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	89.600.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	438.400.436	-	-
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	-	-
Jumlah	3.990.938.260	537.327.211	-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 9.601.937.942,00** dan **Rp3.655.706.747,00**.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	9.006.107.521	3.582.408.837	151,40
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	456.650.538	49.674.561	819,28
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	105.989.250	7.322.150	1.347,52
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	32.602.398	16.301.199	100,00
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Jumlah	9.601.349.707	3.655.706.747	-

D.8 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	-	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	(1.231.211.875)	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 37.881.086.196,00** dan **Rp0,00**.

E.2 SURPLUS (DEFISIT) – LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **31.392.509.049** dan **Rp5.050.193.972,00**. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH (MENGURANGI) EKUITAS

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar **Rp1,003,394,981,00**.

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00** Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

E.3.6 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 1.003.394.981,00** dan **Rp 3.475.841.683,00**.

E.3.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara. antara lain koreksi atas pendapatan. koreksi atas beban. koreksi atas hibah. piutang dan utang.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 106.939.922.577,00** dan **Rp46.407.121.851,00**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L. antar K/L. antar BUN maupun K/L dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	106.939.922.577
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Jumlah	106.939.922.577

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda. baik internal Kementerian/Lembaga. antar Kementerian/Lembaga. maupun Kementerian/Lembaga dengan Bendahara Umum Negara (BUN). Transaksi antar Entitas terdiri dari:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja yang melibatkan Kas Negara (BUN);
2. Transaksi Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L. antar K/L. dan antara K/L dengan BA BUN;
3. Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan. pengesahan pengembalian hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu dalam bentuk kas. barang. maupun jasa/surat berharga.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024. DDEL sebesar **(Rp0,00)** sedangkan DKEL sebesar **Rp0,00**.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L. antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar **Rp 72.551.337.850.00** Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar **Rp0.00**.

E.5 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 114.431.894.705,00** dan **(Rp37.881.086.196,00)**.